

Efektivitas Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Dampak Pembangunan Berkelanjutan

The Effectiveness of Community Empowerment Policy Implementation in Universities in Supporting Sustainable Development Impact

Ahmad Sururi*, Budi Hasanah, Mayu Ma'lumatiyah, Annisa Dwianti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum,
Universitas Serang Raya

Coressponding author: *ahmadbroer@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan implementasi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung dampak berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data meliputi reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi dalam mendukung dampak pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya efektif. Pencapaian tingkat efektifitas hanya tercapai pada aspek derajat perubahan kelompok sasaran dan kualitas proses implementasi sedangkan pada aspek hasil akhir/dampak implementasi masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep atau formulasi kebijakan pemberdayaan masyarakat masih sangat tergantung pada inisiasi dari pihak perguruan tinggi sehingga orientasi masyarakat belum sepenuhnya pada konteks pemberdayaan yang sesungguhnya sehingga outcome atau keluaran dampak implementasi kebijakan pemberdayaan masih bersifat dan belum berkelanjutan. Disisi lain meskipun perubahan kelompok sasaran dan kualitas proses implementasi sudah menunjukkan peningkatan akan tetapi masih memerlukan upaya yang bersifat holistic dalam mendorong dampak implementasi yang efektif.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; pemberdayaan masyarakat; dampak Pembangunan berkelanjutan; perguruan tinggi.

Abstract

The purpose of this study is to discuss how the implementation of community empowerment supports sustainable impacts. The research method uses a qualitative approach. Data collection techniques through interviews and observation. Data analysis includes reduction, data presentation and conclusion. The results of the research show that the implementation of community empowerment policies in tertiary institutions in supporting the impact of sustainable development has not been fully effective. Achievement of the level of effectiveness was only achieved in the aspect of the degree of change in the target group and the quality of the implementation process, while in the aspect of the final result/impact of the implementation it was still not in accordance with the desired expectations. The research findings show that the concept or formulation of community empowerment policies is still very much dependent on initiation from the university so that the orientation of the community is not yet fully in the context of actual empowerment so that the outcomes or outputs impacting the implementation of empowerment policies are still not sustainable. On the other hand, even though changes in

the target group and the quality of the implementation process have shown improvement, they still require efforts that are holistic in nature in encouraging an effective implementation impact.

Keywords: policy implementation; community empowerment; impact of sustainable development; higher education

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi trend di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir yang ditunjukkan melalui transisi dari pendekatan paternalistik dan pasif menuju partisipasi warga yang lebih aktif (Bailey, 2010; Bailey & Pill, 2015; Markantoni et al., 2018; Steiner et al., 2022). Sebagai suatu proses, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui keterlibatan dan partisipasi – yang keduanya mewakili prasyarat pemberdayaan masyarakat (Steiner & Farmer, 2018).

Menurut (Zimmerman, 2000) pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memecahkan permasalahan publik sekaligus sebagai strategi yang berorientasi pada tujuan dan sasaran untuk melakukan perubahan. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat (Meltzer & Schwartz, 2019) dan (Turnbull, 2006) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai instrument pemecahan masalah dalam mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat, memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan publik sebagai sesuatu yang harus diimplementasikan (Tachjan, 2006) sehingga dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan masyarakat dapat dipersepsikan sebagai suatu kebijakan sebagai salah satu bentuk aktivitas kolaborasi dan transformasi pengetahuan yang berorientasi pada tujuan dan sasaran serta perubahan lingkungan sosial masyarakat dan pembangunan secara berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu prinsip dan tanggung jawab perguruan tinggi melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dengan demikian dalam rangka menghadapi perkembangan global yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Institusi perguruan tinggi memiliki peran penting dalam aspek keberlanjutan. Hal ini karena perguruan tinggi merupakan agen kunci dalam pendidikan untuk mencetak pemimpin masa depan yang akan berkontribusi pada keberhasilan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Žalėnienė & Pereira, 2021). Hal tersebut semakin menegaskan posisi institusi perguruan tinggi sebagai salah satu pilar strategis pembangunan dan peradaban suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika global. Dengan demikian menjadi suatu keniscayaan apabila potret peradaban suatu bangsa pada hari ini dan masa mendatang sesungguhnya

tercermin dari wajah perguruan tinggi. Semakin baik wajah perguruan tinggi, semakin berperan perguruan tinggi, semakin dekat perguruan tinggi dengan solusi persoalan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peradaban suatu bangsa (Hidayat, 2020).

Kapasitas perguruan tinggi dalam merespon dan memecahkan permasalahan masyarakat merupakan salah satu indikator kredibilitas dan instrument representative suara kebenaran dan keadilan masyarakat untuk tetap senantiasa bersikap kritis dan objektif untuk memberikan dampak sosial lingkungan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus mampu mengimplementasikan berbagai inisiatif dan tindakan secara kolaboratif agar mampu menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat (T. Moore, 2014). Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh (Albulescu & Albulescu, 2014) yang mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat harus beradaptasi dengan paradigma baru masyarakat yang berbasis pada pengetahuan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ditinjau dari aspek implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan dampak pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran penting perguruan tinggi dalam memberikan kontribusinya terhadap masyarakat, pembangunan lokal dan regional termasuk membangun semangat pemberdayaan dengan lingkungan sosial masyarakat melalui transformasi pengetahuan dan teknologi.

Beberapa bukti penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi Universitas Serang Raya sebagai lokasi penelitian ini masih menemui berbagai hambatan dan permasalahan, seperti belum optimalnya dampak pembangunan berkelanjutan sehingga belum mampu menghasilkan pengetahuan baru dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk beradaptasi yang berbasis pada pengetahuan masyarakat yang berkelanjutan sebagaimana dikemukakan oleh (Albulescu & Albulescu, 2014; T. Moore, 2014). Selain itu permasalahan yang masih ditemui yaitu masih minimnya *outcome* pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini belum sesuai dengan pemenuhan pencapaian penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi melalui pemberdayaan seluruh komponen masyarakat. Permasalahan yang juga menjadi temuan awal penelitian ini adalah belum terimplementasikannya kebijakan yang berasal dari gagasan masyarakat atau *bottom up* sehingga implementasi kebijakan yang dilakukan lebih cenderung bersifat *topdown* atau kebijakan pemberdayaan yang diimplementasikan masih merupakan inisiasi dan gagasan perguruan tinggi.

Penelitian tentang implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi yang dikemukakan oleh (Karlina et al., 2016) menunjukkan adanya

sinergitas antara masyarakat dengan perguruan tinggi pendamping yang telah berhasil memberikan program pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian berbeda dikemukakan (Tinggogoy, 2019) yang menunjukkan masih adanya hambatan komunikasi antar pihak terkait (stakeholders) sehingga implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat belum berjalan efektif. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan (Anyon & Fernández, 2007) yang menyebutkan minimnya kolaborasi antar aktor dalam pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam konteks dampak kebijakan pemberdayaan masyarakat, penelitian tentang dampak perguruan tinggi dalam mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan cenderung menunjukkan fokus yang kuat pada studi kasus yang berhubungan dengan proyek tertentu (Findler et al., 2019), sedangkan menurut hasil penelitian (Maas & Liket, 2011), dampak umumnya disebabkan oleh organisasi atau intervensi (kebijakan, program, proyek, produk, teknologi atau tindakan) yang terjadi di luar organisasi dalam masyarakat atau lingkungan alam dan bukan dampak keberlanjutan dari perguruan tinggi seperti perubahan dunia nyata dalam aspek ekologis, kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat (Koehn & Uitto, 2014).

Beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas memiliki kesesuaian dengan penelitian yang sedang dilakukan, akan tetapi penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi dalam konteks implementasi kebijakan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan masih belum dilakukan secara mendalam. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut (Baker & McLelland, 2003) efektivitas implementasi kebijakan dapat dianalisis dan dievaluasi berdasarkan empat aspek yaitu prosedural (praktik), substantif (kinerja), transaktif (kemahiran) dan aspek normatif (tujuan). Sedangkan (Pradhan et al., 2017) lebih melihat indikator keberhasilan implementasi kebijakan disebabkan dua faktor yaitu dukungan kebijakan pemerintah dan tujuan program pemerintah. Efektifnya implementasi kebijakan merupakan indikasi keberhasilan berjalannya suatu proses yang efektif sehingga untuk menilai implementasi kebijakan yang efektif harus melihat perspektif kapasitas yang meliputi kemampuan analitis, manajerial, dan politik yang melekat pada pembuat kebijakan.

Meskipun demikian, seringkali implementasi kebijakan mengalami kegagalan atau tidak berjalan efektif. Dalam hal ini (Teng & Gu, 2007) berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang efektif bergantung pada hubungan yang baik antara berbagai tingkat pemerintahan dan organisasi di tingkat lokal sehingga cenderung menghasilkan kesenjangan implementasi. Selain itu kegagalan implementasi kebijakan disebabkan karena kurangnya koherensi kebijakan, kurangnya penegakan, mekanisme akuntabilitas, dan kurangnya pembiayaan untuk melaksanakan kebijakan

(Mugwagwa et al., 2015). Secara lebih luas, (Hudson et al., 2019) menyebutkan empat penyebab umum kegagalan implementasi kebijakan yaitu 1)harapan yang terlalu optimis; 2)tata kelola yang tidak tepat; 3)penyusunan kebijakan kolaboratif yang tidak memadai, dan; 4)siklus politik.

Selanjutnya pandangan tentang efektivitas implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan memiliki relevansi dengan pemberdayaan masyarakat dikemukakan oleh (Sandford & Moulton, 2015, pp. 13–14) yang mengatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan seharusnya berorientasi pada perubahan tata cara dan kelompok sasaran dengan melihat mutu proses dan hasil akhir. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat terfokus pada individu, organisasi atau komunitas masyarakat sebagai bagian kelompok sasaran (Zimmerman, 2000). Disisi lain pemberdayaan masyarakat merupakan konstruksi yang menghubungkan kekuatan dan kompetensi individu, sistem bantuan alami, dan perilaku proaktif dengan kebijakan sosial dan perubahan sosial (Rappaport, 1981).

Praktek pemberdayaan masyarakat terjadi di seluruh komunitas dan tingkatan, dimana pekerja sosial memiliki keterlibatan cukup dominan (Bent-Goodley, 2018; Joseph, 2020). Pemberdayaan masyarakat dipromosikan melalui kapasitas dan tindakan untuk mencapai tujuan perubahan social sehingga menjadi instrument bagi organisasi dan komunitas untuk terus berkembang (Carrasco et al., 2016) termasuk dalam hal ini kemampuan perguruan tinggi untuk melakukan suatu terobosan atau pendekatan inovasi model pemberdayaan masyarakat untuk mengukur bagaimana mencapai dampak secara berkelanjutan (Harrach et al., 2020), sehingga untuk mencapai hal tersebut, konteks pemberdayaan masyarakat, penting untuk melakukan pengenalan pemantauan berbasis masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat (Khair et al., 2020).

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Adapun alasan pemilihan pendekatan tersebut dikarenakan penelitian ini melihat dan memahami fenomena sosial yang kompleks melalui pertanyaan penelitian (Yin, 2014). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan melibatkan aktor perguruan tinggi dan masyarakat selaku informan penelitian melalui penentuan informan *purposive sampling*. Lokasi penelitian ini yaitu Universitas Serang Raya sebagai salah satu institusi yang melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat, hal ini menjadi salah satu alasan pemilihan lokasi penelitian sebagaimana dikemukakan (Yin, 2014) yang menyebutkan pemilihan lokasi dapat dilakukan berdasarkan *typical case* atau tipe kasus yang sedang diteliti. Sedangkan analisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan (Miles et al., 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Perubahan pada kelompok sasaran

Dimensi perubahan kelompok sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi Universitas Serang Raya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan target dan pencapaian yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam tridharma perguruan tinggi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengabdian masyarakat, selain aspek pendidikan dan penelitian.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pengabdian masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, dijelaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Fakta empiris penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Universitas Serang Raya berdasarkan aspek derajat perubahan kelompok sasaran sudah tercapai, baik berdasarkan skala dan ukuran target kebijakan maupun tujuan program, artinya derajat perubahan masyarakat sudah mengalami peningkatan pada saat implementasi pemberdayaan masyarakat sedang dilakukan. Jika dikonfirmasi menurut (Findler et al., 2019) hal ini dikarenakan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah mengadaptasi analisis perspektif dampak yang lebih holistik. Disisi lain focus dampak non akademik seperti perubahan masyarakat sudah mendapatkan perhatian oleh perguruan tinggi sebagaimana dampak akademik seperti pengaruh ilmiah dan penelitian (Thomas & Ormerod, 2017).

Menurut (Shearer et al., 2016) dimensi perubahan kebijakan dapat dilakukan melalui tiga elemen kunci yang meliputi institusi (proses, konteks); kepentingan (aktor, kekuasaan). Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yaitu sudah terintegrasinya pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulum program studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya dan dukungan regulasi sebagai legitimasi kebijakan.

Salah satu instrument yang diharapkan mampu mendorong derajat perubahan kelompok sasaran secara berkelanjutan adalah melalui penguatan regulasi yang dapat memaksa dan menentukan perilaku kelompok sasaran (August, 2010). Focus pada penguatan regulasi menjadi landasan legitimasi implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk mendorong inisiasi perguruan tinggi untuk melakukan perubahan kurikulum pembelajaran sehingga mampu menghasilkan output pengetahuan, sikap dan minat yang tinggi baik dari aktor perguruan tinggi maupun target kelompok sasaran.

Menurut (Matti, 2009) bahwa masalah legitimasi yang dihadapi kebijakan publik ada tiga yaitu: mempengaruhi kinerja (dalam hal efektivitas dan efisiensi) program politik dan perangkat kebijakan; batas-batas proses pembuatan kebijakan itu sendiri (melalui dilema legitimasi/efektivitas) serta posisi demokrasi dan kinerja keseluruhan pemerintahan politik di masa depan. Dalam hal ini kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi selain harus menyiapkan struktur kelembagaan, kurikulum berbasis pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya yang tersedia juga harus menerapkan instrument regulasi yang dapat mempengaruhi hasil implementasi kebijakan (Linder & Peters, 1987) dan harus mampu melihat kebutuhan dan akses target kelompok sasaran sebagaimana penelitian yang dilakukan (Ashton et al., 2018) yang mengatakan pentingnya melihat sikap dan perilaku perspektif kelompok sasaran sebagai suatu pendekatan dan metode yang berbeda. Namun, untuk menetapkan perubahan yang diperlukan dalam pendidikan, prinsip-prinsip keberlanjutan perlu menjadi inti dari strategi institusi yang lebih tinggi (misalnya, kurikulum, modus operandi) dan merupakan kunci untuk dimasukkan ke dalam budaya organisasi (Žalėnienė & Pereira, 2021).

B. Kualitas proses implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan secara efektif. Beberapa indikator hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan kualitas pada proses implementasi kebijakan seperti sudah berjalannya tahapan dan proses perencanaan, sosialisasi, akuntabilitas dan pelaporan. Hal ini menunjukkan, bahwa Universitas Serang Raya sudah menunjukkan pentingnya mewujudkan proses dan kualitas implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh (Anderson, 1984) yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan proses pengambilan keputusan atau memilih tindakan untuk memecahkan masalah sosial dan mengadopsi strategi khusus perencanaan dan pelaksanaan yang tepat.

Selanjutnya indikasi yang menunjukkan efektifitas kualitas proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Universitas Serang Raya adalah terdistribusinya sumber daya baik manusia (dosen), anggaran dan kerjasama dengan masyarakat. Dalam hal ini, penempatan dosen sudah dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan dukungan anggaran yang cukup memadai. Selain itu, kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat pada saat kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan proses yang efektif dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif atau kunci dalam setiap kegiatan yang dilakukan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Karlina et al., 2016) yaitu terciptanya sinergitas antara masyarakat dengan perguruan tinggi pendamping dalam program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut (Steiner & Farmer, 2018) pemberdayaan masyarakat harus memanfaatkan teknik pengembangan masyarakat yaitu menggunakan aktor eksternal dan sumber dukungan atau praktik eksogen, dan mereka yang memanfaatkan aset dari dalam masyarakat atau praktik endogen. Kondisi empiris yang menunjukkan sudah efektifnya sinergitas dan peran masing-masing aktor implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat pendidikan tinggi seperti yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa proses diantara para aktor implementasi kebijakan sudah menuju pada tingkat perubahan yang diinginkan sebagaimana dikemukakan (Robinson, 2006).

Efektifnya interaksi dan peran aktor kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi aspek-aspek yaitu: 1) leadership atau kepemimpinan yang mengarahkan tata kelola kolaboratif inisiatif; 2) dorongan atau motivasi dalam menyediakan sumber daya manusia, sumber daya keuangan atau teknis; dan 3) pengikut, yang bergabung dan diorganisir pihak lain (Scott & Thomas, 2016). Termasuk efektifnya kapasitas analisis, manajerial dan politik (Rames et al., 2016) dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.

C. Hasil akhir/dampak implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian hasil akhir dampak implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi Universitas Serang Raya dalam mendukung dampak pembangunan berkelanjutan masih belum optimal dan sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya permasalahan empiris belum efektifnya dampak berkelanjutan sebagai outcome pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Hudson et al., 2019) secara ideal implementasi kebijakan harus memastikan dan mengantisipasi empat sumber penyebab kegagalan yaitu: 1) harapan yang terlalu optimis; 2) tata kelola yang tidak tepat; 3) penyusunan kebijakan kolaboratif yang tidak memadai, dan; 4) siklus politik. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian di atas, maka penyebab belum efektifnya hasil akhir/dampak implementasi adalah kebijakan kolaboratif yang tidak memadai, dalam hal ini kebijakan pemberdayaan masyarakat masih bersifat top down atau sepenuhnya berasal dari inisiasi dan gagasan perguruan tinggi atau belum mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan temuan hasil penelitian yang menunjukkan konsep atau formulasi kebijakan pemberdayaan masyarakat masih sangat tergantung pada inisiasi dari pihak perguruan tinggi sehingga orientasi masyarakat belum sepenuhnya pada konteks pemberdayaan yang sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (T. L. Moore, 2014) yang mengatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi memiliki catatan buruk dalam mengevaluasi dampak inisiatif keterlibatan sipil mereka baik dalam bentuk kemitraan formal maupun nonformal. Dengan demikian kemampuan dan respon perguruan tinggi untuk melakukan suatu terobosan atau pendekatan inovasi model pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan untuk mengukur

bagaimana mencapai dampak secara berkelanjutan (Harrach et al., 2020), selain itu, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penting untuk melakukan pengenalan pemantauan berbasis masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat (Khair et al., 2020).

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep pembangunan merangkum nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dinamis di masyarakat dan mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat *people centered* atau berpusat kepada masyarakat sebagai subjek dan pelaku pembangunan (Sururi, 2015). Oleh sebab itu, sudut pandang (Ilott et al., 2016) dapat digunakan untuk mengatasi bagaimana mengidentifikasi kegagalan dalam proses konsep dan praktek implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari tiga tahap yaitu 1)Meningkat, Pada fase ini sebuah isu menjadi terpolitisasi, mendapatkan perhatian para pejabat publik. Ini adalah titik di mana masalah yang akan ditangani didefinisikan dan diartikulasikan, dan beberapa indikasi seperti apa kesuksesan akan diidentifikasi; 2)Membangun, di sini stakeholder menetapkan kebijakan, institusi, dan target yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah. Tindakan ini harus berfungsi sebagai titik temu bagi koalisi dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan fokus jangka panjang; 3)Menanamkan, yang merupakan periode dengan risiko berkurangnya kepentingan politik, tetapi ini adalah waktu ketika “bahan penyusun” perlu memberikan beberapa bukti keberhasilan.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Universitas Serang Raya menunjukkan efektifitas pada aspek derajat perubahan kelompok sasaran dan kualitas proses implementasi sedangkan pada aspek hasil akhir/dampak implementasi masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep atau formulasi kebijakan pemberdayaan masyarakat masih sangat tergantung pada inisiasi dari pihak perguruan tinggi sehingga orientasi masyarakat belum sepenuhnya pada konteks pemberdayaan yang sesungguhnya.

Hal ini menyebabkan outcome atau keluaran dampak implementasi kebijakan pemberdayaan masih bersifat parsial atau hanya terjadi pada saat implementasi dan masih belum berkelanjutan. Di sisi lain meskipun perubahan kelompok sasaran dan kualitas proses implementasi sudah menunjukkan peningkatan akan tetapi masih memerlukan upaya yang bersifat *holistic* dalam mendorong dampak implementasi yang efektif.

Oleh sebab itu, kebijakan kolaboratif antara aktor perguruan tinggi dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat menjadi suatu keniscayaan dalam mendorong konsep dan formulasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Referensi

- Albulescu, I., & Albulescu, M. (2014). The University in the Community. The University's Contribution to Local and Regional Development by Providing Educational Services for Adults. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 142, 5–11. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.578>
- Anderson, J. (1984). *Public Policy Making (Second ed)*. Holt, Rinehart and Winston.
- Anyon, Y., & Fernández, M. A. (2007). Realizing the Potential of Community-University Partnerships. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 39(6), 40–45. <https://doi.org/10.3200/chng.39.6.40-45>
- Ashton, L. J., Gordon, S. E., & Reeves, R. A. (2018). Key Ingredients—Target Groups, Methods and Messages, and Evaluation—of Local-Level, Public Interventions to Counter Stigma and Discrimination: A Lived Experience Informed Selective Narrative Literature Review. *Community Mental Health Journal*, 54(3), 312–333. <https://doi.org/10.1007/s10597-017-0189-5>
- August, A. (2010). *The art of changing Behaviour of target groups* (Issue August). D.C. de Wildt, SME Advies, Utrecht.
- Bailey, N. (2010). Understanding Community Empowerment in Urban Regeneration and Planning in England: Putting Policy and Practice in Context. *Planning Practice and Research*, 25(3), 317–332. <https://doi.org/10.1080/02697459.2010.503425>
- Bailey, N., & Pill, M. (2015). Can the State Empower Communities through Localism? An Evaluation of Recent Approaches to Neighbourhood Governance in England. Can the state empower communities through localism? An evaluation of recent approaches to neighbourhood governance in England. *Environment and Planning C Government and Policy*, 33(April), 289–304. <https://doi.org/10.1068/c12331r>
- Baker, D. C., & McLelland, J. N. (2003). Evaluating the effectiveness of British Columbia's environmental assessment process for first nations' participation in mining development. *Environmental Impact Assessment Review*, 23(5), 581–603. [https://doi.org/10.1016/S0195-9255\(03\)00093-3](https://doi.org/10.1016/S0195-9255(03)00093-3)
- Bent-Goodley, T. B. (2018). Empowerment in Action: #SWLeadAdvocateChampion. *Social Work (United States)*, 63(2), 101–103. <https://doi.org/10.1093/sw/swy013>
- Carrasco, R. D. F., Monferrer, M. C., & Di Masso Tarditi, A. (2016). Exploring links between empowerment and community-based arts and cultural practices: Perspectives from Barcelona practitioners. *International Journal of Inclusive Education*, 20(3), 229–245. <https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1047659>
- Findler, F., Schönherr, N., Lozano, R., Reider, D., & Martinuzzi, A. (2019). The impacts of higher education institutions on sustainable development: A review and conceptualization. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 20(1), 23–38. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2017-0114>
- Harrach, C., Geiger, S., & Schrader, U. (2020). Sustainability empowerment in the workplace: determinants and effects. *Sustainability Management Forum / NachhaltigkeitsManagementForum*, 28(3–4), 93–107. <https://doi.org/10.1007/s00550-020-00505-1>
- Hidayat, A. (2020). *Peran perguruan tinggi dalam membangun integritas kemanusiaan dan kebangsaan indonesia* (pp. 1–17).
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-

- implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Ilott, O., Randall, J., Bleasdale, A., & Norris, E. (2016). *Making policy stick - Tackling long-term challenges in government*. Joseph Rowntree Foundation (JRF). <https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/making-policy-stick>
- Joseph, R. (2020). The theory of empowerment: A critical analysis with the theory evaluation scale. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30(2), 138–157. <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1660294>
- Karlina, R., Adila, I., & Kusumastuti, A. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kota Malang. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 112. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i2.271>
- Khair, N. K. M., Lee, K. E., & Mokhtar, M. (2020). Sustainable City and Community Empowerment through the Implementation of Community-Based Monitoring: A Conceptual Approach. *Sustainability (Switzerland)*, 12(22), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su12229583>
- Koehn, P. H., & Uitto, J. I. (2014). Evaluating sustainability education: Lessons from international development experience. *Higher Education*, 67(5), 621–635. <https://doi.org/10.1007/s10734-013-9669-x>
- Linder, S. H., & Peters, B. G. (1987). A Design Perspective on Policy Implementation : The Fallacies of Misplaced Prescription. *Policy Studies Review*, 6(3), 459–475.
- Maas, K., & Liket, K. (2011). Social Impact Measurement: Classification of Methods. In *Eco-Efficiency in Industry and Science book series (ECOE, volume 27)* (pp. 171–202). https://doi.org/10.1007/978-94-007-1390-1_8
- Markantoni, M., Steiner, A., Meador, J. E., & Farmer, J. (2018). Do community empowerment and enabling state policies work in practice? Insights from a community development intervention in rural Scotland. *Geoforum*, 97(October), 142–154. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.10.022>
- Matti, S. (2009). *Exploring Public Policy Legitimacy, A Study of Belief-System Correspondence in Swedish Environmental Policy* [Lulea University of Technology]. http://pure.ltu.se/portal/files/3012491/Simon_Matti_DOC2009.pdf
- Meltzer, R., & Schwartz, A. (2019). *Policy Analysis as Problem Solving A Flexible and Evidence-Based Framework*. Routledge. <https://www.routledge.com/Policy-Analysis-as-Problem-Solving-A-Flexible-and-Evidence-Based-Framework/Meltzer-Schwartz/p/book/9781138630178>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. In *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Moore, T. (2014). Community-University Engagement: A Process for Building Democratic Communities. In *Wiley Online Library* (Vol. 40, Issue 2). <https://doi.org/10.1002/aehe.20014>
- Moore, T. L. (2014). *Community–University Engagement 1*. Wiley Online Library. <https://doi.org/10.1002/aehe.20014>
- Mugwagwa, J., Edwards, D., & de Haan, S. (2015). Assessing the implementation and influence of policies that support research and innovation systems for health: The cases of Mozambique, Senegal, and Tanzania. *Health Research Policy and Systems*, 13(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12961-015-0010-2>

- Pradhan, N. S., Su, Y., Fu, Y., Zhang, L., & Yang, Y. (2017). Analyzing the Effectiveness of Policy Implementation at the Local Level: A Case Study of Management of the 2009–2010 Drought in Yunnan Province, China. *International Journal of Disaster Risk Science*, 8(1), 64–77. <https://doi.org/10.1007/s13753-017-0118-9>
- Rames, M., Howlett, M. P., & Saguin, K. (2016). *Measuring Individual-Level Analytical, Managerial and Political Policy Capacity: A Survey Instrument* (Issue 65).
- Rappaport, J. (1981). In Praise of Paradox: A Social Policy of Empowerment Over Prevention. *American Journal of Community Psychology*, 9(1), 1–25. <https://doi.org/10.1007/BF00896357>
- Robinson, S. E. (2006). A decade of treating networks seriously. *Policy Studies Journal*, 34(4), 589–598. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2006.00192.x>
- Sandford, J., & Moulton, S. (2015). *Effective Implementation in Practice: Integrating Public Policy and Management*. John Wiley & Sons.
- Scott, T. A., & Thomas, C. W. (2016). Unpacking the Collaborative Toolbox : Why and When Do Public Managers Choose Collaborative Governance Strategies ? *Policy Studies Journal*, 00(00), 1–24.
- Shearer, J. C., Abelson, J., Kouyate, B., Lavis, J. N., & Walt, G. (2016). Why do policies change? Institutions, interests, ideas and networks in three cases of policy reform. *Health Policy and Planning*, 31(9), 1200–1211. <https://doi.org/10.1093/heapol/czw052>
- Steiner, A., & Farmer, J. (2018). Engage, participate, empower: Modelling power transfer in disadvantaged rural communities. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 36(1), 118–138. <https://doi.org/10.1177/2399654417701730>
- Steiner, A., Mcmillan, C., Connor, C. H. O., Steiner, A., Mcmillan, C., & Connor, C. H. O. (2022). Investigating the contribution of community empowerment policies to successful co- production- evidence from Scotland. *Public Management Review*, 00(00), 1–23. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2033053>
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.229>
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (P. Caroline & D. Mariana (eds.)). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
- Teng, F., & Gu, A. (2007). Climate change: national and local policy opportunities in China. *Environmental Sciences*, 4(3), 183–194. <https://doi.org/10.1080/15693430701742735>
- Thomas, R., & Ormerod, N. (2017). The (almost) imperceptible impact of tourism research on policy and practice. *Tourism Management*, 62, 379–389. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.02.009>
- Tinggogoy, F. L. (2019). Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu. *Jurnal Aaspirasi*, 10(1), 43–49.
- Turnbull, N. (2006). How Should We Theorise Public Policy? Problem Solving and Problematicity. *Policy and Society*, 25(2), 3–22. <https://doi.org/10.1016/s1449->

4035(06)70072-8

- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: design and methods* (Fifth Edit). SAGE Publications Inc.
- Žalėnienė, I., & Pereira, P. (2021). Higher Education For Sustainability: A Global Perspective. *Geography and Sustainability*, 2(2), 99–106. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.001>
- Zimmerman. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and community levels of analysis. In *Handbook of Community Psychology; Rappaport, J., Seidman, E., Eds.; Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York, NY, USA*, (pp. 43–63).